

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis peneliti mengenai Penjaringan Pembinaan dan Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jakarta Selatan 2021-2022. Terdapat pembahasan yang menjadi poin dikesimpulan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam upaya penjaringan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dinas Sosial memiliki petugas sendiri yaitu P3S (petugas pelayanan, pengawasan dan perlindungan sosial) yang ikut membantu proses penjaringan atau penertiban yang di koordinasikan dengan Satpol PP. proses penanggulangan PMKS yang dilakukan Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan dengan cara menjaga 13 titik pantau rawan PMKS yang tersebar di 10 kecamatan Jakarta Selatan serta tiap harinya ada petugas posko yang menjaga dan berpatroli dibagi menjadi 3 sif 3 sif, pagi jam 07:00 sampai jam 03:00, siang jam 03:00 sampai jam 11:00 malem dan sif ketiga malem 11:00 sampai jam 07:00 WIB.
2. Selanjutnya hasil penjaringan yang dilakukan petugas P3S maupun Satpol PP untuk wilayah Jakarta Selatan dirujuk pada Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 untuk dilakukan pendataan meliputi identifikasi dengan menanyakan kepada yang bersangkutan kronologis kenapa bisa

terjaring oleh petugas dan mengidentifikasi warga binaan sosial masuk kedalam kategori atau jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) apa misalnya gelandangan atau pengemis. Kedua Registrasi Setelah dilakukan proses identifikasi, maka selanjutnya warga binaan sosial di data identitasnya Meliputi : Nama, Tempat/ Tanggal Lahir, Alamat, klasifikasi dan di data tanggal masuk panti serta dilakukan foto pada yang bersangkutan. Langkah selanjutnya warga binaan sosial yang sudah di registrasi diseleksi sesuai dengan criteria berdasarkan assesmen.

3. Pada tahap pelayanan yang dilakukan Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 meliputi Perawatan kebersihan, Penyediaan pakaian, Penyediaan makanan dan minuman 3 kali sehari serta diberi makanan ringan dan terakhir Perawatan kesehatan setiap hari dipantau melalui pendamping wisma koordinasi dengan perawat juga Setiap bulan ada pemeriksaan rutin dari puskesmas kecamatan kebon jeruk.
4. Upaya pembinaan untuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 dilakukan 21 hari. Pembinaan yang didapatkan warga binaan sosial dipanti meliputi bimbingan konseling psikologi setiap hari senin jam 10:00 sampe dengan jam 12:00 siang, bimbingan agama dilaksanakan oleh Pak Toba Ristani S.pd, M.H selaku narasumber bimbingan rohani islam yang dilaksanakan setiap hari rabu jam 10:00 sampai dengan jam 12:00 siang, bimbingan hukum dipandu oleh Bapak Suratman dari

kepolisian dilakukan setiap hari Kamis jam 10:00 sampai jam 12:00 siang dan bimbingan hukum dari Bhabinkamtibmas setiap hari Selasa jam 10:00 sampai jam 12:00 siang, bimbingan keterampilan untuk yang perempuan diberi keterampilan mude yang dipandu oleh Ibu Hikmah dengan memberikan keterampilan pembuatan Mude, Tempat Tisu, Bros dan lainnya dilakukan pada setiap hari Selasa jam 01:00 sampai jam 15:00 sore sedangkan untuk laki-laki diberi bimbingan keterampilan keset yang dipandu oleh Bapak Salman setiap hari Kamis jam 01:00 sampai jam 15:00 sore dan terakhir bimbingan fisik Pelaksanaan kegiatan fisik berupa senam dilakukan setiap hari Jumat jam 08:00 pagi.

5. Pada tahap pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dilakukan Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 meliputi penyaluran ke keluarga, rujukan ke panti pembinaan dan pemulangan ke daerah asal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Pelaksanaan penjaringan, pembinaan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sudah cukup efektif. Dengan kerjasama antara P3S dan Satpol PP dan lembaga-lembaga terkait. penanggulangan gelandangan dan pengemis di DKI Jakarta sangat sulit karena para pelaku sebagian besar bukan warga Jakarta. Jakarta sebagai ibu kota negara dengan

Product Domestic Bruto (PDB) terbesar di Indonesia terus menjadi tujuan migrasi khususnya urbanisasi. Sehingga diperlukan kerjasama antar daerah untuk mencegah mobilitas gelandangan dan pengemis. Sehingga tidak ada lagi gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Ibu Kota Jakarta.

